

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Model pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada prinsipnya merupakan cara suatu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang direalisasikan melalui bidang-bidang (sektor-sektor ekonomi) perekonomian yang menjadi aktivitas atau mata pencaharian masyarakat. Sasaran dari model pembangunan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat ini dapat diterangkan dengan menggunakan pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow. Pendekatan ini dapat pula dipergunakan sebagai dasar penilaian masyarakat di suatu daerah terhadap hasil dari pelaksanaan model pembangunan yang sebelumnya telah dijalankan.

#### **2.1. Teori Pembangunan**

Konsep mengenai pembangunan ekonomi berawal dari kegagalan sebagian besar negara-negara dunia ketiga yang selama ini mengadopsi konsep pertumbuhan tradisional (Todaro, 1997: 134-135). Konsep ini diawali dengan teori pertumbuhan moderen yang dikemukakan oleh *Simon Kuznet* pada tahun 1971. Menurut *Kuznet*, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga makna yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adanya kenaikan output secara berkesinambungan yang merupakan manifestasi atau perwujudan dari apa yang selanjutnya disebut pertumbuhan ekonomi. Kemampuan dalam menyediakan berbagai jenis barang itu merupakan tanda kematangan ekonomi (*economic maturity*) di suatu negara.
- 2) Perkembangan teknologi merupakan dasar atau pra kondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Ini merupakan suatu kondisi yang sangat diperlukan, akan tetapi masih belum mencukupi karena masih membutuhkan faktor-faktor lainnya.
- 3) Untuk mewujudkan potensi pertumbuhan yang ada dalam pengertian teknologi baru, diperlukan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi di bidang teknologi tanpa dibarengi dengan inovasi sosial tidak akan dapat memberikan dampak yang berarti atau tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, maka aspek-aspek yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tergolong cukup luas. Peningkatan kapasitas output hanyalah indikasi bahwa perekonomian di negara tersebut dianggap memiliki kesiapan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang secara berkesinambungan (Arsyad, 1998: 128-129).

Dari pengertian teori pembangunan di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan pembangunan dalam arti yang luas tidak semata hanya ditujukan untuk menaikkan pendapatan nasional setiap tahunnya, akan tetapi juga bermakna memperluas

kegiatan-kegiatan ekonomi dari masyarakat sehingga mencapai tujuan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakatnya (Arsyad, 1998: 14). Pengertian ini sekaligus sebagai penyempurnaan dan kritik terhadap aliran pemikiran yang berorientasi untuk meningkatkan pendapatan nasional (GNP) sebagai sasaran kebijakan ekonomi. Untuk memberikan batasan yang jelas di antara perbedaan konsep pembangunan ekonomi (*economic development*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perlu diberikan pengertian sebagai berikut:

- 1) Pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan GDP ataupun GNP pada suatu periode tertentu yang melebihi tingkat pertambahan penduduk
- 2) Pembangunan ekonomi dapat pula diartikan sebagai perkembangan GNP ataupun GDP yang terjadi pada suatu periode tertentu yang diikuti pula adanya perombakan dan modernisasi struktur perekonomian.

Perbedaannya dengan konsep pertumbuhan ekonomi bahwa konsep ini hanya memperhatikan kenaikan GDP ataupun GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk ataupun terjadinya perubahan pada struktur perekonomian.

## **2.2. Teori Pembangunan di Daerah**

Teori ekonomi saat ini masih belum mampu untuk menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif (Arsyad, 1998: 275). Beberapa teori ekonomi hanya dapat memberikan penjelasan yang bersifat parsial untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan pembangunan ekonomi di daerah. Pada

prinsipnya, teori-teori tersebut menjelaskan mengenai metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dalam hal ini pula, aspek keterbatasan dalam pengembangan metode analisis perekonomian daerah masih sering ditemukan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya keterbatasan tersebut adalah (Arsyad, 1998: 275):

- 1) Data mengenai daerah masih relatif terbatas terutama apabila dilakukan pembedaan berdasarkan pengertian daerah nodal. Keterbatasan data ini akan mempersulit dilakukannya pengembangan metode analisis perekonomian daerah yang memberikan informasi secara ekonomi mengenai daerah tersebut.
- 2) Data yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya ataupun tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis. Pada umumnya, data yang terkumpul seringkali hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional.
- 3) Pada umumnya, data mengenai perekonomian daerah lebih sulit untuk dikumpulkan. Hal ini dikarenakan data mengenai perekonomian daerah bersifat lebih terbuka di mana aliran yang masuk ataupun keluar tidak selalu dapat dijangkau dengan metode pengumpulan data yang pada umumnya sering dipergunakan.
- 4) Di negara-negara sedang berkembang, selain sulitnya data tersebut diperoleh, seringkali juga ditemukan bahwa data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan

kondisi yang sesungguhnya. Hal inilah yang selanjutnya akan mempersulit analisis mengenai kondisi perekonomian di suatu daerah.

Jika dilakukan suatu perbandingan antara perekonomian nasional dan perekonomian daerah, maka akan terlihat perekonomian daerah lebih tertinggal dibandingkan perekonomian nasional baik ditinjau dari aspek cakupan analisis maupun kedalamannya. Analisis ekonomi regional yang digunakan saat ini masih menggunakan kerangka pemikiran pembangunan ekonomi di negara-negara maju. Analisis seperti ini bertolak belakang dengan kondisi dan struktur perekonomian di negara-negara sedang berkembang termasuk struktur perekonomian daerahnya. Hal seperti ini akan menyebabkan perancangan kebijakan pembangunan ekonomi cenderung tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Hingga saat ini, setidaknya terdapat lima teori ekonomi yang masih dianggap relevan dalam memberikan penjelasan mengenai pembangunan ekonomi di daerah. Adapun teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di daerah atau ekonomi regional ini adalah:

1) Teori Ekonomi Neo Klasik

Peranan teori ekonomi neo klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah (regional). Dimensi spasial yang dikemukakan oleh pendekatan (teori) neo klasik tidak signifikan untuk menerangkan permasalahan-permasalahan dalam pembangunan ekonomi di daerah. Ada dua konsep pokok yang hingga saat ini masih dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Berdasarkan kedua konsep pokok tersebut, sistem

perekonomian akan mencapai bentuk keseimbangan secara alamiah apabila tidak terdapat adanya restriksi atas modal. Jika kondisi ini terpenuhi, maka modal akan mengalir dari daerah yang memiliki tingkat upah tinggi menuju ke daerah dengan tingkat upah yang rendah.

## 2) Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi atau *economic base theory* menerangkan bahwa faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah faktor yang berhubungan secara langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya lokal seperti tenaga kerja dan bahan baku akan menghasilkan kekayaan daerah dan selanjutnya akan mendorong penciptaan maupun perluasan lapangan kerja (*job creation*). Strategi pembangunan daerah berdasarkan konsep ini adalah strategi yang pelaksanaannya difokuskan pada peran dari bantuan (*aid*) yang ditujukan kepada dunia usaha terutama yang memiliki pasar baik secara nasional maupun internasional. Kelemahan pendekatan teori basis ekonomi ini terletak pada permintaan eksternal yang selanjutnya menyebabkan adanya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun internasional. Pada sebagian besar kasus ekonomi regional, pendekatan ini dinilai cukup bermanfaat terutama dalam menciptakan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat dalam mengembangkan stabilitas ekonomi.

### 3) Teori Lokasi

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya tidak dapat dilepaskan maknanya dari aspek lokasi. Pada umumnya, produsen akan cenderung untuk meminimumkan biaya produksi dengan cara memilih lokasi yang dapat memaksimumkan keuntungan maupun peluangnya untuk mendekati pasar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas maupun kelayakan (*suitability*) dari suatu lokasi ini cukup luas, yaitu upah tenaga kerja, biaya atas energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kualitas pemerintah daerah dan tanggungjawabnya, dan sanitasi. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan yang bervariasi dalam mengkombinasikan faktor-faktor yang menentukan kualitas maupun kelayakan dari suatu lokasi. Keterbatasan dari teori lokasi ini adalah adanya kemampuan teknologi dan komunikasi moderen yang saat ini telah dapat mengubah secara signifikan atas aspek kualitas maupun kelayakan dari suatu lokasi tertentu yang selanjutnya ditujukan untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.

### 4) Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral (*central place theory*) menganggap bahwa terdapat suatu hirarki tempat (*hiearchy of place*) di mana setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil untuk menyediakan sumberdaya industri dan bahan baku. Tempat sentral yang dimaksudkan tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah setempat. Pada umumnya, teori tempat sentral ini lebih banyak

diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah baik yang terdapat di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Misalnya, adanya perbedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan) yang seringkali terlihat pada konsep penataan ruang dan wilayah. Beberapa daerah di sini bisa menjadi daerah penyedia jasa, sedangkan daerah lainnya hanya sebagai daerah pemukim.

5) Teori Kausasi Kumulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan berlakunya konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif (*cumulative causation*) seperti yang dimaksudkan di sini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung untuk menyebabkan kesenjangan antara daerah menjadi sangat tinggi. Dalam hal ini, daerah yang maju akan mengalami akumulasi keunggulan kompetitif yang lebih baik dibandingkan daerah-daerah lainnya. Kondisi seperti inilah yang selanjutnya disebut *backwash effect*.

6) Teori Daya Tarik

Teori daya tarik industri (*industry attraction*) adalah model pembangunan ekonomi yang termasuk paling banyak diaplikasikan di daerah. Teori ekonomi yang mendasari adanya daya tarik industri ini menerangkan bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi maupun insentif. Hal ini dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar daerah-daerah makmur memiliki industri-industri yang kompetitif dan unggul secara ekonomi.



### **2.2.1. Tujuan Pembangunan Daerah**

Pembangunan daerah saat ini atau setelah secara bersamaan ditetapkan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi terutama yang terdapat di daerah-daerah tertinggal (KNPDT, 2006: 3). Tujuan tadi merupakan tujuan secara umum dari orientasi pembangunan nasional yang juga menjadi dasar berpijak bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Tujuan secara khusus dari pembangunan di daerah berdasarkan landasan dasar pembangunan nasional tadi adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitas model pembangunan partisipatif
- 2) Memberdayakan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif terutama untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
- 3) Memperbesar akses masyarakat terhadap keadilan
- 4) Meningkatkan kemudahan hidup masyarakat terutama keluarga miskin melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial ekonomi.

Dari kedua tujuan pembangunan di daerah secara umum maupun secara khusus ini akan dijadikan sebagai landasan berpikir untuk merancang model pembangunan yang diharapkan dapat memenuhi keseluruhan tujuan-tujuan tersebut.

### **2.2.2. Sasaran dari Model Pembangunan**

Model pembangunan dirancang sedemikian rupa sesuai sasaran yang diharapkan dapat dijangkau secara keseluruhan melalui serangkaian pelaksanaan

kegiatan atau program-program pembangunan. Berdasarkan Draft Petunjuk Pelaksanaan dari Model Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, model pembangunan dirancang terutama berperan untuk menstimulasi percepatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di daerah-daerah dan menguatkan kapasitas pemerintah daerah. Agar dapat menjangkau sasaran yang diharapkan dari model pembangunan seperti ini, dalam perencanaan model pembangunan dikenal ada 2 bentuk sasaran, yaitu sasaran lokasi dan sasaran kelompok. Adapun uraian dari masing-masing sasaran tersebut adalah (KNPDT, 2006: 3-4):

1) Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi dari perancangan model pembangunan adalah daerah-daerah tingkat kabupaten yang termasuk ke dalam kategori Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan Keputusan MNPDT No. 001/Kep/M-PDT/02/2005 yang terdiri atas:

a) Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal yang dimaksudkan adalah daerah tingkat kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala (lingkup) nasional. Ciri-ciri daerah tertinggal yang dimaksudkan tadi adalah:

- Tertinggal secara ekonomi
- Tertinggal secara sumberdaya manusia
- Tertinggal dalam hal ketersediaan prasarana/infrastruktur
- Tertinggal dalam hal aksesibilitas

Kabupaten Sikka di Propinsi NTT termasuk pula ke dalam daerah yang dimaksudkan sebagai bagian dari Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Lebih dari separauh daerah tingkat kecamatan di Kabupaten Sikka, Propinsi NTT ini berdasarkan ciri-ciri di atas termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal.

b) Daerah Khusus dan Perbatasan

Daerah khusus atau perbatasan yang dimaksudkan di sini adalah daerah tingkat kabupaten yang mengalami bencana alam, bencana sosial, serta beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain.

2) Sasaran Kelompok

Sasaran kelompok yang menjadi bagian dari Program Percepatan Daerah Tertinggal melalui perancangan model pembangunan adalah mereka yang terdiri atas:

- a) Pemerintah Daerah
- b) Komunitas dan masyarakat setempat
- c) Lembaga sosial kemasyarakatan.

Ketiga sasaran di atas adalah sasaran berdasarkan konsep atau model pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Untuk tingkat pemerintah daerah, sasaran kelompok ini hanya diorientasikan pada komunitas dan masyarakat setempat dan lembaga sosial kemasyarakatan. Apabila faktor kemandirian pemerintah daerah telah dapat diwujudkan, maka sasaran pembangunan nasional ataupun pembangunan di daerah sudah sepenuhnya ditujukan untuk sasaran kelompok selain pemerintah daerah.

### **2.3. Model Pembangunan**

Model pembangunan adalah suatu bentuk rancangan program pembangunan sesuai dengan orientasi dan sasaran yang hendak dicapai dengan berlandaskan pada tujuan yang telah ditetapkan (Rumagit, 2002). Perlu diketahui bahwa tujuan dari dibentuknya model pembangunan terutama yang diberlakukan pada lingkup regional maupun nasional ini adalah:

- 1) Untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat, seperti: pendapatan, pendidikan, pangan, konsumsi, dan kesehatan
- 2) Untuk menumbuhkan harga diri masyarakat, harkat dan martabat dan saling menghormati/menghargai
- 3) Untuk memperluas dan meningkatkan pilihan-pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nyata mereka
- 4) Untuk meningkatkan pencapaian nilai budaya masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan atau mengefektifkan pencapaian tujuan tersebut, model pembangunan yang digunakan terlebih dahulu dikaji sesuai dengan permasalahan pokok di daerah yang menjadi sasaran dari pelaksanaan model pembangunan tersebut. Faktor keterbatasan sumberdaya dan pertimbangan keberlanjutan juga akan menentukan prioritas dalam pelaksanaan dari suatu model pembangunan.

#### **2.3.1. Berbagai Model Pembangunan Yang Populer**

Pada prinsipnya, model pembangunan itu dirancang atau ditentukan berdasarkan realita ketidakseimbangan berupa perilaku yang tidak normatif yang dimainkan oleh *stakeholders* pembangunan Indonesia. Realitas tersebut merupakan

konsekuensi dari minimnya modal sosial yang dimiliki mereka (Rumagit, 2002). Berdasarkan realita permasalahan tersebut, maka terdapat 3 bentuk model pembangunan yang umumnya dijalankan, yaitu:

1) Model *Social-Action*

Model *social action* menekankan pada gerakan pembangunan sosial yang dilakukan secara partisipatif (*collective action*). Pembangunan dilakukan sebagai gerakan moral yang lebih mengutamakan pembangunan modal sosial, seperti: kepatuhan pada sistem norma (*norms*), tata nilai (*values*), sikap (*attitudes*), keyakinan (*beliefs*), budaya bernegara (*civic culture*), saling percaya (*social-trust*), solidaritas dalam bekerjasama (*solidarity cooperation*), perilaku dalam bekerjasama (*cooperative behavior*), peran dan aturan main (*roles and rules*), jaringan kerja (*networks*), hubungan interpersonal (*interpersonal relationship*), tata cara dan keteladanan (*procedures and precedents*), organisasi sosial (*social organization*), keterkaitan horizontal dan vertikal (*horizontal and vertical linkages*). Secara kuantitatif, proporsi modal sosial yang diintervensi dalam pembangunan ekonomi relatif lebih banyak (kurang lebih 75 persen) dibandingkan ketiga modal yang lain (manusia, alamiah dan fisik). Dengan demikian model ini lebih dikenal dengan pembangunan ekonomi berbasis pembangunan sosial.

2) Model *Social-Policy*

Model *social policy* lebih menekankan pada perombakan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan relasi kekuasaan, upaya deregulasi atau diciptakannya regulasi baru untuk menjunjung tinggi supremasi hukum,

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, hak-hak kepemilikan, atau hak-hak masyarakat sipil. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi kerakyatan, diperlukan beberapa upaya advokasi untuk mengubah kebijakan dalam sistem agribisnis, antara lain:

- a) Subsistem agronomi (sarana produksi)
- b) Subsistem usaha tani/produksi (lokasi, pemilihan komoditas, pola usahatani, teknologi yang digunakan)
- c) Subsistem agroindustri/pengolahan hasil (sarana dan prasarana usaha)
- d) Subsistem pemasaran (harga, produk, *market intelligence*)
- e) Subsistem penunjang (perbankan/kredit, tataniaga, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan dan penyuluhan/pendampingan usaha).

### 3) Model *Sustainable*

Model berkesinambungan (*sustainable*) menekankan pada intervensi modal sosial, modal manusia, modal fisik dan modal alamiah (*environment*) secara sinergis dan berimbang dalam pembangunan ekonomi. Model ini lebih dikenal dengan pembangunan ekonomi seiring dengan pembangunan sosial (Kartasmita, 1996), atau model pembangunan yang mandiri (Hettne, 2001), atau pembangunan berkelanjutan karena semua faktor produksi (*total factors productivity*) digunakan secara berimbang (Anwar, 2002).

Dalam lingkup pembangunan regional seperti di Indonesia, tidak semua daerah dapat diterapkan dengan model pembangunan yang sama. Kesamaan karakteristik tidak menjamin bahwa pelaksanaan dari model pembangunan tersebut akan efektif

menjangkau sasaran seperti yang diharapkan. Faktor lain seperti akses daerah menuju pusat perekonomian secara nasional juga akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan model pembangunan.

### **2.3.2. Model Pembangunan dan Komposisi Alokasi**

Program-program pembangunan yang dirancangan sesuai dengan model pembangunan yang diterapkan ini akan dilaksanakan atau direalisasikan berdasarkan komposisi alokasi, yaitu berupa bidang-bidang dalam pembangunan. Keseluruhan bidang-bidang pembangunan tersebut kemudian akan dilaksanakan berdasarkan masing-masing sektor dalam perekonomian. Adapun sektor-sektor ekonomi yang dimaksudkan terdiri atas:

- 1) Sektor pertanian
- 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian
- 3) Sektor Industri Pengolahan
- 4) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
- 5) Sektor Bangunan (perumahan)
- 6) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran
- 7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
- 8) Sektor Keuangan, Perumahan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Sektor Jasa-Jasa.

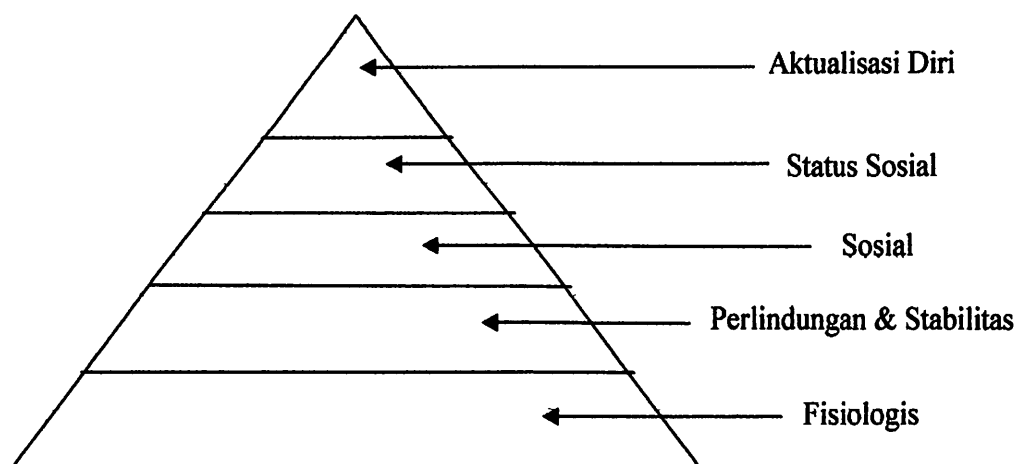
Masing-masing sektor ekonomi seperti yang disebutkan di atas adalah pengelompokan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdapat di suatu daerah berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian. Tidak semua daerah baik di tingkat

kabupaten maupun kota memiliki keseluruhan aktivitas perekonomian seperti yang disebutkan di atas. Untuk kasus di Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT, sektor-sektor ekonomi yang tidak disertakan adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

### 2.3.3. Teori Kebutuhan dari Maslow

Pada sub bab sebelumnya telah diuraikan bahwa model pembangunan dirancang sedemikian pula yang ditujukan untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran dari pelaksanaan model pembangunan tersebut. Untuk memahami kebutuhan masyarakat akan model pembangunan yang diinginkan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan hierarki kebutuhan manusia dari Abraham Maslow. Menurut Maslow, manusia mempunyai lima kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau disebut juga hirarki dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat . Tingkatan ini membentuk pola piramid seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.1 di bawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Piramida Hierarki Kebutuhan dari Maslow**





Dari Gambar 2.1 di atas, kebutuhan yang paling utama, yaitu kebutuhan fisiologis digambarkan memiliki ruang yang paling besar dan menjadi dasar dari terpenuhinya keseluruhan kebutuhan di atasnya. Ini berarti, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan perlindungan dan stabilitas, kebutuhan sosial, kebutuhan status sosial, dan kebutuhan aktualisasi diri terlebih dahulu harus dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan fisiologis. Maslow mendasarkan konsep hierarki kebutuhan pada dua prinsip. Pertama, kebutuhan-kebutuhan manusia dapat disusun dalam satu hierarki dari kebutuhan terendah sampai yang tertinggi. Kedua, setelah kebutuhan terpuaskan berhenti menjadi motivator utama dari pelaku. Menurut Maslow, manusia akan didorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu, keadaan dan pengalaman yang bersangkutan mengikuti suatu hierarki ( Hani Handoko,1990:158 ).

Dalam menerapkan model pembangunan di suatu daerah, pendekatan teori hierarki kebutuhan dari Maslow ini dapat digunakan sebagai landasan berpikir untuk mengetahui model pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat yang terdapat di suatu daerah. Keterkaitan model pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat dan teori hierarki kebutuhan dari Maslow ini dapat dijelaskan dengan menguraikan masing-masing tingkatan kebutuhan tersebut sesuai dengan sasaran-sasaran pelaksanaan dari model pembangunan. Adapun tingkatan-tingkatan dalam hierarki kebutuhan Maslow seperti yang dimaksudkan ini adalah:

1) **Kebutuhan Fisiologis (Kebutuhan Dasar)**

Kebutuhan fisiologis diartikan sebagai kebutuhan dasar dari manusia yang terdiri atas kebutuhan akan :

- a) Pangan
- b) Pemenuhan gizi keluarga
- c) Tempat tinggal
- d) Kesehatan keluarga

Unsur-unsur dalam kebutuhan fisiologis di atas sebenarnya merupakan bentuk pemenuhan aspek kesejahteraan masyarakat yang terdapat di suatu daerah.

## 2) Kebutuhan Perlindungan dan Stabilitas

Pada tingkatan ini, kebutuhan akan perlindungan dan stabilitas yang diterapkan ke dalam penilaian hasil pelaksanaan dari model pembangunan adalah kebutuhan akan perlindungan atas segala bentuk kerawanan ataupun ancaman sosial dan jaminan akan stabilitas terhadap kondisi di masa yang akan datang. Adapun kebutuhan perlindungan dan stabilitas ini terdiri atas:

- a) Resiko kekurangan gizi keluarga
- b) Gangguan keamanan dan ketertiban
- c) Perlindungan atas resiko gagal panen
- d) Pengaduan masyarakat
- e) Perlindungan usaha

## 3) Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial yang diterapkan ke dalam penilaian atas hasil-hasil dari pelaksanaan model pembangunan ini merupakan kebutuhan akan terciptanya hubungan sosial yang ideal/harmonis di antara individu-individu dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Adapun unsur-unsur pemenuhan yang terdapat

dalam kebutuhan sosial ini adalah:

- a) Adanya paguyuban petani
- b) Sentra usaha dan koperasi
- c) Penyelenggaraan acara adat
- d) Penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan masyarakat

4) **Kebutuhan Status Sosial (Kebutuhan akan Harga Diri)**

Kebutuhan yang berkaitan pada aspek status sosial yang digunakan pada penilaian hasil-hasil dari pelaksanaan model pembangunan merupakan bentuk kebutuhan manusia yang mewujudkan terciptanya suatu kedudukan, pengakuan, reputasi, penghargaan, ataupun kepercayaan diri di dalam lingkungan masyarakat. Unsur-unsur sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan akan status sosial ini adalah:

- a) Pengakuan status sosial
- b) Kesempatan dalam berpolitik

5) **Kebutuhan Aktualisasi Diri**

Kebutuhan aktualisasi diri keterkaitannya dengan penilaian terhadap hasil-hasil dari pelaksanaan model pembangunan merupakan kebutuhan akan pengakuan atas penggunaan potensi diri dan pengembangannya. Adapun mengenai unsur-unsur yang terdapat pada pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri ini adalah:

- a) Kesempatan untuk pengembangan potensi usaha
- b) Kesempatan untuk pengembangan pendapatan.